

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Desa tidak hanya menjadi tempat tinggal masyarakat, tetapi juga menjadi pusat aktivitas pembangunan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Yasinda (2017, hlm. 45), keberhasilan pembangunan desa bergantung pada sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Namun, banyak desa di Indonesia yang masih menghadapi tantangan besar dalam menjalankan pembangunan. Faktor-faktor seperti keterbatasan kompetensi aparatur desa, minimnya partisipasi masyarakat, serta rendahnya koordinasi antar pihak menjadi kendala utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sobian (2022, hlm. 12) menekankan bahwa aparatur desa memegang peran kunci dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia sering menjadi penghambat utama dalam mencapai tujuan tersebut.

Desa Abbokongang, yang terletak di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar baik dari segi sumber daya alam maupun masyarakatnya. Namun, upaya pembangunan yang terarah di desa ini tidak terlepas dari tantangan, termasuk bagaimana meningkatkan kinerja aparatur desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam konteks ini, penting untuk memahami kondisi kinerja aparatur desa saat ini, kendala-kendala yang dihadapi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan kinerja mereka guna mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Menurut Yusvita (2022,

hlm. 101), lemahnya kinerja aparatur desa sering kali disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan minimnya pendampingan teknis dalam menjalankan program pembangunan.

Tantangan yang dihadapi oleh aparatur desa tidak hanya berasal dari faktor internal seperti kurangnya kompetensi dan pengalaman, tetapi juga dari faktor eksternal seperti lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menjadi tantangan signifikan. Dalam penelitian Yasinda (2017, hlm. 50), disebutkan bahwa salah satu penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat adalah kurangnya transparansi pemerintah desa dalam menyusun dan mengimplementasikan program-program pembangunan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara pemerintah desa dan masyarakat yang seharusnya menjadi mitra dalam pembangunan.

Faktor eksternal seperti lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lain juga turut memperparah situasi. Sobian (2022, hlm. 15) mencatat bahwa koordinasi yang buruk sering kali mengakibatkan tumpang tindih program pembangunan, sehingga alokasi sumber daya tidak optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan strategi yang berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan kerja sama dengan masyarakat dan pihak terkait.

Pentingnya peran aparatur desa dalam pembangunan tidak hanya berkaitan dengan tugas administratif, tetapi juga mencakup aspek kepemimpinan dan inovasi. Penelitian Yusvita (2022, hlm. 105) menunjukkan bahwa aparatur desa yang memiliki kompetensi tinggi dapat mendorong terciptanya program-program pembangunan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini membutuhkan pendekatan berbasis pemberdayaan, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilaksanakan di Desa Abbokongang, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap. Penelitian ini

bertujuan untuk mengkaji kondisi kinerja aparatur Desa Abbokongang, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja aparatur desa. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan teoretis, tetapi juga rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kinerja aparatur Desa Abbokongang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait pembangunan desa?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Aparatur Desa Abbokongang dalam meningkatkan kinerja untuk mewujudkan pembangunan yang terarah?
3. Strategi apa yang diterapkan untuk mengembangkan kinerja Aparatur Desa agar mampu mendukung pembangunan yang terarah di Desa Abbokongang?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Bagaimana kondisi kinerja aparatur Desa Abbokongang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait pembangunan desa
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Aparatur Desa Abbokongang dalam meningkatkan kinerja untuk mewujudkan pembangunan yang terarah
3. Untuk merumuskan strategi apa yang diterapkan untuk mengembangkan kinerja Aparatur Desa agar mampu mendukung pembangunan yang terarah di Desa Abbokongang

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang relavan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan literatur tentang pengelolaan kinerja aparatur desa dalam konteks pembangunan pedesaan.
 - b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait strategi peningkatan kinerja aparatur desa dalam pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi Pemerintah Desa
Memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kinerja Aparatur Desa, termasuk strategi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan terarah.
 - b. Bagi Pemerintah Daerah
Menyediakan informasi yang berguna dalam menyusun kebijakan atau program pelatihan yang dapat mendukung kinerja Aparatur Desa di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - c. Bagi Masyarakat
Memberikan wawasan tentang pentingnya sinergi antara Aparatur Desa dan masyarakat dalam proses pembangunan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Desa.
3. Kegunaan kebijakan
 - a. Menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan desa dalam merancang strategi yang mendukung profesionalitas Aparatur Desa
 - b. Memberikan masukan bagi pengembangan rencana pembangunan desa (RPJMDes) agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

